



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor: 06/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/04/2022

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 20 April 2022

KY Rekomendasikan Sanksi Terhadap 9 Hakim

Jakarta (Komidsi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan 7 usulan sanksi kepada 9 orang hakim karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada periode triwulan I tahun 2022. Adapun rincian hakim yang terbukti melanggar KEPPH, yaitu: 7 orang hakim dijatuhi sanksi ringan, 1 orang hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 1 orang hakim dijatuhi sanksi berat.

Usulan sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada 3 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 4 orang hakim. Sementara usulan sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dijatuhkan kepada 1 orang hakim. Untuk sanksi berat, KY mengusulkan 1 orang hakim pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Rekomendasi sanksi ini masih dalam tahap minutasasi di KY yang selanjutnya akan disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA)

"Pada triwulan I tahun 2022 terdapat 7 register dengan hasil putusan terbukti. Sebanyak 5 register terbukti dijatuhi usul penjatuhan sanksi sejumlah 9 orang, satu diantaranya merupakan sanksi berat. Sedangkan 2 register lainnya juga dinyatakan terbukti dengan hasil tidak dijatuhi usul penjatuhan sanksi dikarenakan laporan tersebut sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh BAWAS MA RI (*Nebis In Idem*) sejumlah 2 orang. Hingga saat ini sejumlah 6 register dalam proses minutasasi dan 1 register dalam proses persuratan," ungkap Joko.

KY Panggil 60 Orang Terperiksa

Penjatuhan sanksi yang disampaikan KY ke MA berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh Anggota KY. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak termasuk pelapor dan saksi yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengumpulan bukti-bukti yang detail sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor.

"KY telah memanggil 60 orang yang terdiri dari pelapor, saksi, ahli dan terlapor untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data atau bukti terkait dugaan pelanggaran KEPPH. KY mengoptimalkan teknologi informasi dengan melakukan

pemeriksaan daring untuk peningkatan pelayanan publik, tanpa terhambat keadaan akibat pandemi Covid-19," papar Joko.

Dari 60 orang diperiksa di periode tahun ini, lanjut Joko, ada 47 orang yang hadir memenuhi panggilan KY.

Penanganan lanjutan laporan masyarakat selanjutnya adalah sidang panel. Pada periode 3 Januari hingga 31 Maret 2022 dilakukan sidang panel terhadap tujuh laporan. Kemudian KY melanjutkan dengan sidang pleno untuk menentukan terbukti atau tidak terbukti melanggar KEPPH.

"KY melaksanakan sidang pleno terhadap 38 laporan, kemudian diputuskan bahwa 7 laporan terbukti melanggar dan 31 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH. Dari 7 putusan sidang pleno tersebut, KY memberikan usulan sanksi terhadap 9 hakim, dan ada 1 hakim yang dikenai sanksi berat," pungkas Joko.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Juru Bicara KY
Miko Ginting
Hp: 087822626362

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,
(021) 3906189
www.komisiyudisial.go.id
email: humas@komisiyudisial.go.id



PELAKSANAAN SIDANG PANEL



7 LAPORAN

- Tidak dapat ditindaklanjuti (4 laporan)
- Dapat ditindaklanjuti (3 laporan)

USULAN SANKSI SAMPAI 31 MARET 2022



Sanksi Ringan (7 hakim)
- Teguran tertulis (3);
- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (4).

Sanksi Sedang (1 hakim)
- Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun (1).

Sanksi Berat (1 hakim)
- Pemberhentian dengan Tidak Hormat (1).



Semua usulan sanksi yang diajukan KY masih dalam proses minutasi putusan.



PELAKSANAAN SIDANG PLENO



- Terbukti melanggar KEPPH (7 Laporan)**
- Tidak terbukti melanggar KEPPH (31 Laporan)**

“
Terperiksa yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Komisi Yudisial pada 3 Januari s.d. 31 Maret 2022 sejumlah **60** orang, dimana 45 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tunggakan dan 15 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan. Adapun Terperiksa yang hadir sebanyak 34 orang terkait pemeriksaan berkas tunggakan, dan 13 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan.”

